JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)
Volume 4 Nomor 2, APRIL 2023. HALAMAN 84 - 97

e- ISSN : 27970086
p- ISSN : 27970434

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada OPD Kabupaten Deli Serdang)

Kesuma Puja Lestari[a], Afrah Junita[b], Iqlima Azhar[c]
Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra
Email: pujalestarikesuma@gmail.com[a]*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of human resource competence, government accounting standards and government internal control systems on the quality of local government financial reporting information. The sampling technique in this study was purposive sampling, namely sampling with certain considerations with a total sample of 93 respondents. Methods of data collection using a questionnaire. The data analysis method used is multiple linear regression. The results of this study indicate that the competence of human resources has an effect positive and significant to the quality of local government financial report information. Government accounting standards have a positive and significant effect on quality of local government financial reporting information. The government's internal control system has a positive and significant effect on the quality of report information local government finances. Competence of human resources, government accounting standards and the government's internal control system simultaneously affect the quality of local government financial report information in Deli Serdang Regency.
Keyword: Human Resource Competence, Government Accounting Standars, Government Internal Control Systems, Financial Reporting Information

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan jumlah sampel sebanyak 93 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.
Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintahan meningkat seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Pemerintah diatur untuk memberikan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintahan yang bisa diakses oleh masyarakat umum melalui internet sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informais keuangan daerah. Pemerintah dituntut agar

mampu menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sesuai dengan amanah yang telah diberikan.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai laporan keuangan OPD yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efesiensi OPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Laporan keuangan OPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin akan melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah dan akan memberikan penilaian berupa opini. Jika opini yang diberikan BPK berupa wajar tanpa pengencualian, maka laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Suhardjo, 2019). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meraih prestasi *quatrick* atau empat kali berturut-turut sejak tahun 2018-2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengencualian (WTP). Penghargaan diserahkan oleh Gubsu, H. Edy Rahmayadi didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Sumatera Utara. Dalam sambutannya tersebut Gubsu mengharapkan kedepanya bahwa raihan opini WTP menjadi hal yang lumrah dan bukan suatu kebanggan. Karena itu dibutuhkan kolaborasi untuk mencapainya. Adapun langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyelaraskan hal tersebut dengan pengimplementasian dalam mensejahterakan rakyat, sehingga ada bahan evaluasi dan membuat satu daerah menjadi lebih baik dari tahu ke tahun sehingga opini WTP yang didapatkan tidak hanya sekedar penghargaan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi yang dapat memberikan informasi terkait dengan keuangan yang dapat diapahami serta dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan dapat ditentukan dari kriteria maupun unsur-unsur kualitas yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Terdapat empat karakteristik kualitas informasi laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan:

a. Relevan

Dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki manfaat serta dapat memberikan pengaruh untuk pengambilan keputusan. Dimana informasi yang dikatakan relevan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (predictive value), dapat memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya

(feedback value) dan informasi harus tersedia tepat waktu untuk pengguna informasi dapat menggunakannya sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan (timeliness).

b. Andal

Keandalan informasi merupakan Informasi dalam laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, disajikan dengan jujur (netral) dan dapat diverifikasi (verifiable).

c. Dapat Dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan dapat digunakan jika informasi dapat dibandingkan dengan informasi laporan keuangan sebelumnya atau dengan laporan keuangan lainnya.

d. Dapat Dipahami

Data yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dirasakan, akan membantu klien dan dikomunikasikan dalam kata-kata yang disesuaikan sejauh mungkin. Untuk situasi ini, klien diterima untuk memiliki informasi yang cukup tentang latihan dan iklim kerja elemen pengungkapan, seperti halnya keinginan klien untuk memperoleh kemahiran dengan data.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Arfianti (2011) bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudakan visi dan misi suatu organisasi. Kompetensi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mencapai kinerja yang berkualitas dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvesi 2005). Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang selanjutnya disingkat (PSAP), yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. Selain itu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan konsep dasar dalam penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa serta pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 4 dan 5).

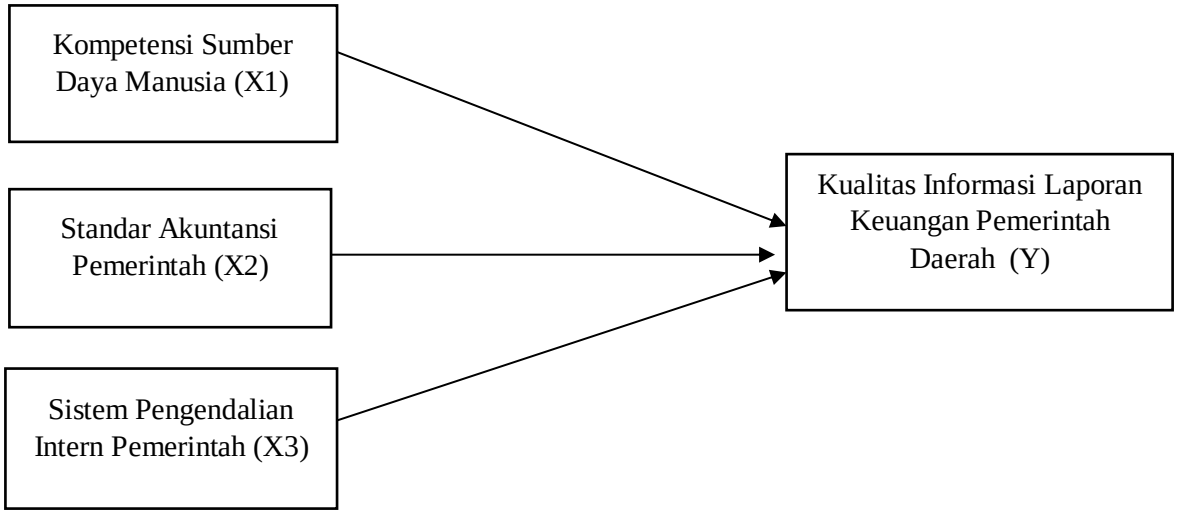
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dalam pemerintah daerah adalah siklus dasar dalam kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah dan semua perwakilan untuk memberikan kepercayaan dalam pencapaian tujuan otoritatif melalui latihan yang sukses, mahir dan solid.

Unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal pemerintah menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan pada lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

H_1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H_2: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H_3: Sistem pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H_4: Kompetensi Sumber Daya Manusia. Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian langsung yang dilakukan terhadap objek untuk memperoleh data primer yaitu pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti (Ridwan, 2004:24). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, yang berisikan pertanyaan dan alternatif jawaban yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari dinas, badan, kecamatan, sekretaris daerah, sekretaris DPRD dan inspektorat yang berjumlah 53 bagian (Perda Kab. Deli Serdang No. 7 Tahun 2020). Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu dinas dan badan yang terdapat pada OPD Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 31. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam pengelolaan data dan hasil pengujian yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data digunakan untuk mengetahui apakah data valid dan reliabel. Dalam uji kualitas data digunakan dua pengujian yaitu :

Uji Validitas

Nilai r hitung dicocokkan dengan r tabel pada taraf signifikan 5% . Jika r hitung lebih besar dari r tabel 5% maka dikatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig	Hasil Uji
Kompetensi Sumber Daya Manusia	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,025	Valid
	X1.3	0,000	Valid
	X1.4	0,001	Valid
	X1.5	0,000	Valid
	X1.6	0,008	Valid
Standar Akuntansi Pemerintah	X2.1	0,012	Valid
	X2.2	0,006	Valid
	X2.3	0,000	Valid
	X2.4	0,038	Valid
	X2.5	0,019	Valid
	X2.6	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	X3.1	0,000	Valid
	X3.2	0,000	Valid
	X3.3	0,000	Valid
	X3.4	0,003	Valid
	X3.5	0,000	Valid
	X3.6	0,000	Valid
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah	Y1	0,000	Valid
	Y2	0,001	Valid
	Y3	0,002	Valid
	Y4	0,000	Valid
	Y5	0,000	Valid
	Y6	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas pada masing-masing variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pada setiap

variabel di dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur suatu objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2014:173). Data dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,60.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Hasil Uji
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,859	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	0,754	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	0,919	Reliabel
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,840	Reliabel

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai Cronbach Alpha di atas 0,60. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel yang ada dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi uji klasik, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas dan uji heteroskedastiditas. Berikut penjelasan mengenai uji klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini :

Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas sebaran data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan paraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai Sig > 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai Sig < 0.05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

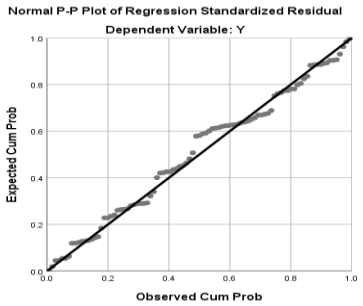
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.04710750
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.052
	Negative	-.096
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.874[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikan Asymp. Sig sebesar 0,874. Oleh karena itu nilai sig > 0,05 maka dapat dikatakan normal karena syarat Asymp Sig sudah terpenuhi yaitu 0,874 > 0,05, dengan demikian uji regresi linear dapat dilakukan.



Gambar 1. Grafik Normalitas

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa titik-titik ploting yang terdapat pada gambar Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal, artinya persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0.01 atau sama dengan nilai VIF < 10. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* kurang dari 0.10 maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018:108).

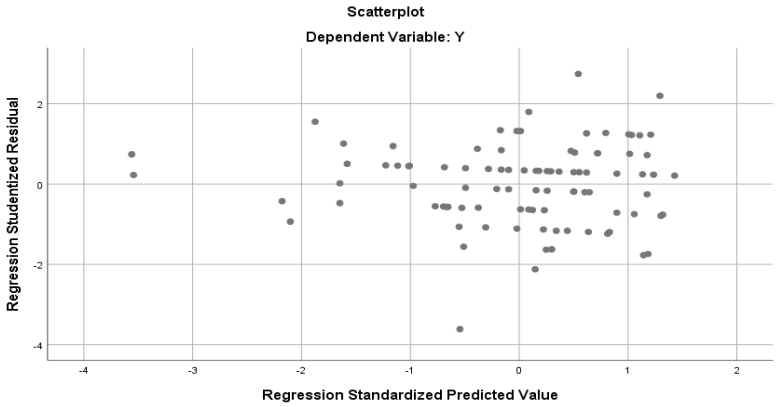
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIP
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,979	1,022
Standar Akuntansi Pemerintah	0,985	1,016
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,989	1,011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil bahwa setiap variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemeirntah memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIP < 10. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Jika terdapat pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedadtiditas. Jika terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak untuk digunakan berdasarkan masukan variabel X terhadap variabel Y.



Gambar 2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik heteroskedastisitas terlihat titik-titik yang tidak merata atau tidak teratur serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, dengan demikian hal ini dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan menggunakan regresi berganda sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Keterangan :

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
X_2 = Standar Akuntansi Pemerintah
X_3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
α = Konstanta
$\beta_{1,2,3,}$ = Koefisien Regresi
E = *error*

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	12.173	5.032		4.407	.000
	X1	.213	.093	.213	2.118	.019
	X2	.105	.120	.093	1.877	.043
	X3	.142	.073	.132	1.306	.036

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel koefisien regresi di atas, pada kolom Undstandardized Coefficient diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 12{,}173 + 0{,}213\ X_1 + 0{,}105\ X_2 + 0{,}142\ X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda, maka dapat diimplementasikan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 12,173 yang mana artinya apabila nilai variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah bernilai tetap, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 12,173
2. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,213 yang artinya setiap terjadi pertambahan variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar satu satuan, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,213.
3. Variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,105, hal ini dapat dikatakan bahwa setiap terjadi pertambahan variabel standar akuntansi pemerintah satu satuan, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 0,105.
4. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien 0,142, hal ini dapat dikatakan bahwa setiap terjadi pertambahan variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar satu satuan, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,142.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima.
b. Nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 6 Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	12.173	5.032		4.407	.000
	X1	.213	.093	.213	2.118	.019
	X2	.105	.120	.093	1.877	.043
	X3	.142	.073	.132	1.306	.036

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 6 Dapat dilihat bahwa:

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki t hitung sebesar 2,118 dengan sig sebesar 0,106. Karena nilai sig < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Variabel standar akuntansi pemerintah memiliki t hitung sebesar 1,877 dengan nilai sig sebesar 0,043. Dikarenakan nilai sig < 0,05 maka hipotesis diterima, yang artinya bahwa variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Variabel standar akuntansi pemerintah memiliki t hitung sebesar 1,306 dan nilai sig sebesar 0,036. Karen anilai sig < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemeirntah daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, jika nilai signifikan F < 0,05 maka H_0 ditolak. Apabila nilai F > 0,05 maka H_0 diterima.

Tabel 7 Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73.622	3	101.207	47.279	.031[b]
	Residual	385.540	89	2.332		
	Total	389.161	92			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 47,279 dengan nilai signifikan sebesar 0,031. Karena nilai signifikan < 0,05 maka penelitian ini dinyatakan bahwa variabel independen yang terdiri atas Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R^2 sama dengan nol ($R^2 = 0$) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Uji R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796	.479	.424	1.381

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai R sebesar 0,796. Hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki hubungan yang kuat yaitu sebesar 7,96 %. Nilai Adjust R Square yang dihasilkan 0,424 yang berarti 42,4 % dari variasi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan sisanya 57,6 % diterangkan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 4.12 uji t dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai T Hitung sebesar 2,118 dan nilai signifikan sebesar 0,19 dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakian tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, maka akan semakin meningkat pula kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya tentunya dapat memahami akuntansi dengan baik dan kemudian mengimplementasikan pengetahuan serta pemahamannya dalam proses menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi serta aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, sumber daya manusia yang berpengalaman tentunya dapat bekerja dengan cepat dan tepat sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan selesai tepat waktu.Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dina et al (2016) yang menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12 diketahui bahwa variabel standar akuntansi pemerintah memiliki nilai T Hitung sebesar 1,877 dan nilai signifikan sebesar 0,43 dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah

daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman standar akuntansi pemerintah maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan. Di dalam standar akuntansi pemerintah terdapat aturan yang harus tersaji di dalam laporan keuangan pemerintah daerah, apabila standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan baik maka laporan yang disajikan oleh pemerintah daerah juga akan memiliki kualitas sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Megawati et al (2015) yang menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12 diketahui bahwa variabel Ssistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai T hitung sebesar 1,306 dan nilai signifikan sebesar 0,36 dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian intenr merupakan salah satu cara untuk mengarahkan serta mengukur sumber daya manusia pada instansi serta berperan penting dalam pencegahan terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan digunakan dalam mencapai tujuan serta mampu menyediakan informasi keuangan yang andal dan menjamin ditaatinya peraturan yang berlaku (Maksyur, 2015). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani, S (2015), Mahaputra dan Putra (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik secara parsial maupun secara simultan.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas daerah penelitian dengan memperbanyak jumlah responden. Selain menggunakan kuesioner gunakan juga metode pengumpulan data dengan mensurvei lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden selama proses pengisian kuesioner agar jawaban responden lebih menggambarkan jawaban yang lebih baik untuk mendapatkan informasi selain yang ada di dalam kuesioner penelitian. Selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat

mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, seperti komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman sistem akuntansi keuangan, karena variabel bbeas dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 42,4 % dan sisanya sejumlah 57,4 % dipengaruhi oleh variabel lain.

REFERENSI

Arfianti, Dita, 2011, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Batang), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Aryani, F, 2013, Analisis Faktor-Faktor yang Mmepengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN, Skripsi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Bastian, I, 2011, Standar Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Salemba Empat

Bergman, Michael and Jan Erik, L, 1990, *Public Policy in A Principal Agent Framework*, *Journal of Theoritical Politics*

Choirunisah, F, 2008, Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan Standar Akuntansi Instansi (Studi pada Ssatuan Kerja di Wilayah KPPN Malang), Jurnal UGM

Harlinda, H, 2016, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Dearah (studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)

Hevesi, G, Alan, 2005, *Standars for Internal Control in New Year State Government*

Ghozali, Imam, 2018, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, Badan Penerbit Universitas Diponegoro :Semarang.

Indriasari, Desi, dkk, 2008, Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang), Simposium Nasional Akuntansi

Karmila, Tanjung, dkk, 2014, Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Pengendalian Itern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Riau)

Mahaputra, Putra, 2014, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 8 No.2

Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Andi : Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sari Gusrya Indah, Fadli, 2019, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : PT Alfabeta.

Surastyani, Bestari, dkk, 2015, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Wati Desiana Kadek, Herawati, dkk, 2014, Pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Wiraputra, Wayan Kusuma, dkk, 2014, Pengaruh Pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Klungkung), Jurnal Mahasiswa Akuntansi

Yuliani, Rahmawati Dwi Agustini, 2016, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah